

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi dana publik, khususnya teknik dan analisis akuntansi yang digunakan dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik mencakup semua organisasi pemerintah dan nirlaba. Seiring berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Sebagai bagian dari sektor publik, pemerintah daerah wajib menyediakan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan daerah, kebutuhan masyarakat dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas. Artinya, pemerintah daerah harus transparan dan akuntabel dalam membuat laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan tentu saja mengakses laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah perlu menyajikan informasi keuangan yang benar-benar berguna bagi penggunanya.

Pelaporan keuangan pemerintah senantiasa dipantau oleh sistem pengendalian internal. Sistem ini memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran serta sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh opini audit yang tepat. Selain sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah juga berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran, dan pelaporan keuangan yang dimasukkan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntansi keuangan daerah yang mapan juga akan meningkatkan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Terkait dengan perwujudan akuntabilitas memiliki relevansi dengan Q.S An-Nisa ayat 58:

Q.S An – Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam surah An-Nisa ayat 58 disebutkan bahwa manusia memiliki dua tujuan. Pertama, mereka ingin menciptakan keharmonisan sosial yang dapat mengarah pada keadilan, dan kedua, mereka ingin menjaga keharmonisan dan keadilan yang membawa kemaslahatan umum bagi masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LDKD) dinilai setiap tahun oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK mengeluarkan opini uji tuntas wajar tanpa pengecualian (WTP), laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Keempat opini yang dikeluarkan

auditor tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTD), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 terbukti berkualitas dan dapat diterima. Hal ini terlihat dari opini audit yang diberikan BPK kepada Pemda Yogyakarta. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan Pemda DIY sesuai standar akuntansi pemerintahan memuat informasi penting seperti pelaksanaan anggaran, perubahan kelebihan saldo anggaran, operasional dan arus kas, serta perubahan modal per 31 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa poin ditampilkan secara akurat. Laporan keuangan Pemda Kota Yogyakarta dinilai berkualitas, dibuktikan dengan hasil opini audit BPK. Laporan keuangan Pemda Kota Yogyakarta ini juga berhasil meraih predikat laporan WTP untuk ke-14 kalinya berturut-turut. Dengan mendapatkan predikat opini WTP sebanyak - 14 kali, Pemda Kota Yogyakarta telah berkomitmen untuk menerapkan pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan keuangan sesuai dengan ketentuan. Pemda Kota Yogyakarta didorong oleh pencapaian opini WTP untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Walaupun telah menerima Opini WTP, BPK masih menemukan beberapa masalah dengan pengelolaan keuangan daerah.

Pada November dan Desember 2022 saat BPK melakukan pemeriksaan interim terhadap penggunaan anggaran oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta dan

didapati sejumlah persoalan administratif di sejumlah organisasi perangkat daerah. Yang dimana permasalahan tersebut di antaranya menyangkut pengembalian sisa bantuan keuangan khusus 2021 yang disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran 2022, serta ketidaksesuaian pengadaan UPT Logan dan kekurangan volume pekerjaan pada pedestrian di Kawasan Malioboro.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi proses akuntansi bergantung pada kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah sebanding dengan tingkat akuntabilitas dan transparansinya. Pelaporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa manajer wilayah bertanggung jawab menjalankan perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Kualitas pelaporan keuangan berfokus pada tanggung jawab atau kewajiban pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang baik dari pemerintah daerah sangatlah penting.

Pengetahuan akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kompetensi akuntansi merupakan elemen kunci dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi berkualitas tinggi yang dapat digunakan oleh pengguna informasi pelaporan keuangan. Keterampilan ini merupakan kemampuan mencatat dan mengkategorikan secara signifikan lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi. Semakin baik pemahaman akuntansi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Rochmatin (2018), Fathia *et al.* (2020) dan Zubaidi *et al.* (2019)

yang menunjukkan bahwa kemampuan akuntansi yang memadai akan meningkatkan hasil dari laporan keuangan pemerintahan.

Sistem informasi keuangan daerah juga memainkan peran penting dalam penyusunan laporan keuangan; sistem ini mencakup proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan pelaporan keuangan, yang diharapkan menghasilkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik jika sistem akuntansi keuangan daerah dibuat dengan baik. Laporan keuangan harus memiliki informasi berkualitas tinggi dan berguna untuk pengambilan keputusan agar bermanfaat bagi penggunanya. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan dalam teknologi informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirim dengan cepat dan akurat sehingga dapat dibuat laporan keuangan yang baik. Semakin baik penggunaan sistem informasi akuntansi, semakin baik laporan keuangan yang dibuat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Wahyu *et al.* (2022) dan Pramita dan Suhaeli (2017) yang menunjukkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan negara, sistem pengendalian intern tidak bisa dipisahkan. Sistem pengendalian intern digunakan dalam penyusunan laporan keuangan negara. Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen bahwa organisasi mencapai tujuannya. Sistem ini memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut dilaporkan dan disusun secara akurat, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai

dengan persyaratan untuk memperoleh opini audit yang tepat. Sistem yang baik dirancang, dibangun, dan berfungsi dengan baik hanya jika setiap bagian di dalamnya bekerja sesuai fungsinya. Hal ini dibuktikan dari penelitian Suarmika dan Suputa (2016) dan Rochmatin (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektivitas sistem pengendalian internal.

Dengan adanya predikat opini WTP pada laporan keuangan daerah Kota Yogyakarta, maka penelitian ini memfokuskan hal – hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai kapabilitas akuntansi, sistem pengendalian akuntansi daerah, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rocmatin dan Agnes Alfiyanti (2018) menunjukkan adanya pengaruh dari sistem pengendalian internal yang memperkuat sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Fungsi sistem pengendalian internal tersebut sejalan dengan tujuan adanya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan keuangan serta dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan.

Atas dasar penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan lokasi, jumlah sampel dan periode waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini mengubah variabel sistem pengendalian internal menjadi variabel moderasi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pembaharuan penelitian ini akan dilakukan didaerah yang berbeda yaitu Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian akan mengangkat judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Kapabilitas Keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Moderasi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kapabilitas akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan?
2. Apakah sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal memperkuat hubungan antara kapabilitas akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian internal memperkuat hubungan antara sistem informasi keuangan daerah dan kualitas pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menguji secara empiris kapabilitas akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan
- 2) Menguji secara empiris sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan
- 3) Menguji secara empiris sistem pengendalian internal memperkuat hubungan antara kapabilitas akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan
- 4) Menguji secara empiris sistem pengendalian internal memperkuat hubungan antara sistem informasi keuangan daerah dan kualitas pelaporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kapabilitas akuntansi, sistem pengendalian akuntansi daerah, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.